

**EVALUASI PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
PADA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN DAN PERTAMBANGAN ENERGI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Diploma IV (D-IV)
Politeknik Universitas Andalas

Oleh :

MARNELIA

06096045



**PROGRAM BEASISWA UNGGULAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIPLOMA IV AKUNTANSI PEMERINTAHAN
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009



No. Alumni Univesitas	Marnelia	No. Alumni Fakultas
-----------------------	----------	---------------------

a). Tempat/Tanggal Lahir : Koto Panjang, 05 Februari 1983 b) Nama Orang Tua: Ha (alm) dan Limarna c) Jurusan : Akuntansi d) Program studi : Akuntansi Pemerintah e) NBP : 08096045 f) Tgl Lulus: 11 Agustus 2009 g) Predikat Lulus : **San Memuaskan** h) IPK : **3,34** i) Lama studi: 32 bulan j) Alamat Orang Tua: K Panjang No. 55 Kenagarian Barung-Barung Balantai Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pes Selatan, Sumatera Barat.

Evaluasi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Energi Kabupaten Pesisir Selatan
 Tugas Akhir DIV oleh Marnelia. Pembimbing 1. Nurul Fauzi, SE, MM, Ak. 2. Irda Rosita, MEd, St, Ak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengevaluasi bagaimana penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Energi Kabupaten Pesisir Selatan dan untuk melihat bagaimana kinerja keuangan Dinas Kopperindag ini setelah diterapkannya Anggaran Berbasis Kinerja. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung, melakukan wawancara dengan beberapa orang pegawai serta melihat dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Penelitian menggunakan analisis deskriptif. Untuk memberikan penjelasan guna memudahkan dalam menginterpretasi hasil analisis lebih lanjut, salah satu cara yang penulis lakukan adalah dengan mengelompokkan program/kegiatan-kegiatan kerja berdasarkan masing-masing sektor yang ada pada Dinas Kopperindag dan menyajikannya dalam bentuk tabel. Hasil evaluasi penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Kopperindag Kabupaten Pesisir Selatan adalah sudah Baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat persentase keberhasilan pencapaian sasaran dan target. Begitu juga dengan kinerja keuangannya yang telah menerapkan prinsip *value money* dalam merealisasikan anggaran. Penulis mengatakan sudah baik, karena dari mulai penyusunan anggaran Dinas Kopperindag ini sudah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan untuk 5 tahun yang akan datang beserta dengan indikator-indikator yang jelas yaitu *input*, *output*, dan *outcome*, *benefit* dan *impact*.

Skripsi telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 11 Agustus 2009

Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji:

Tanda Tangan	1	2	3	4
Nama Terang	Zahara, SE, M, Ak, Ak	Gustati, SE, Ak	Arnel Yentifa, SE, Ak	Nurul Fauzi, SE, MM, Ak

Mengetahui:

Ketua Jurusan Nurul Fauzi, SE, MM, Ak.
 Nama



Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus:

Nomor alumni Fakultas:	Nama	Petugas Fakultas/ Universitas Tanda Tangan
Nomor alumni Universitas:	Nama	Tanda Tangan

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (yang lebih dikenal dengan undang-undang Otonomi Daerah yang telah direvisi menjadi undang-undang no. 32 tahun 2004) dan Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005), pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah harus mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, efektif dan ekonomis. Salah satu bentuk dari perubahan pengelolaan keuangan daerah yang tampak yaitu diterapkannya anggaran yang berbasis pada kinerja. Dengan berlakunya Undang-Undang dan Peraturan tersebut di atas, maka membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien, efektif dan ekonomis (3E), terutama dalam upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan kinerja pemerintahan daerah ini dapat dipenuhi dengan cara menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) seperti yang disebut dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) menyatakan bahwa, dalam rangka penyusunan RAPBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan

prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan anggaran berbasis kinerja (ABK).

Anggaran Berbasis Kinerja dapat diartikan sebagai penyusunan anggaran yang didasarkan pada target kinerja tertentu. Maksudnya Anggaran disusun sesuai dengan beban target kinerja. Artinya, target kinerja bersifat tetap dan menjadi dasar dari penyusunan anggaran. Namun sebelumnya kinerja ini dapat diubah-ubah sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ditetapkan dalam plafon anggaran.

Selama ini pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan tidak berdasarkan pencapaian atas target dan tujuan yang telah ditetapkan, namun lebih menekankan pada bagaimana mengalokasikan atau menghabiskan anggaran yang telah ditetapkan. Sebelum terjadi reformasi pengelolaan anggaran daerah, pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah lebih ditujukan pada pemerintahan yang lebih tinggi, pengendalian dan audit keuangan belum berjalan dengan baik, proses penyusunan anggaran berdasarkan sistem tradisional menggunakan pendekatan *incremental* dan *line item* (pendekatan menurut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan) dengan penekanan pertanggungjawaban pada setiap input yang dialokasikan.

Sementara itu pada saat sekarang pemerintah daerah diminta untuk menunjukkan pertanggungjawabannya kepada masyarakat melalui DPRD, penekanan pertanggungjawaban tidak hanya sekedar pada *input* saja tetapi juga pada *output* dan *outcome*, anggaran disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan

daerah, dan lebih menerapkan konsep *Value for Money* dalam mengelola anggaran daerah (APBD).

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja memerlukan perubahan pola pikir dan orientasi dari *inputs* ke *outputs dan outcome oriented*. Di sisi lain, penerapan anggaran ini memerlukan komitmen yang tinggi dari semua pihak disertai dengan langkah konkrit penataan instansi baik di Pusat maupun di Daerah, adanya kerangka hukum yang jelas dan pasti, dukungan kemampuan Sumber Daya Manusia, aparatur serta kerjasama yang efektif antara eksekutif dan legislatif, serta kerangka kerjasama dengan stakeholders lainnya, Merujuk pada penjelasan umum UU No.17 Tahun 2003, dalam upaya meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan *pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah* dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.

Belakangan ini pemerintah daerah sudah mulai menyusun APBD berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja. Salah satu contohnya yaitu Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Salah satu SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja adalah Dinas Koperasi Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan (Kopperindag). Meskipun Dinas Kopperindag telah menyusun APBD berdasarkan anggaran berbasis kinerja, namun dalam pelaksanaannya masih belum begitu maksimal, baik dari segi penyusunan anggaran maupun dari segi kinerja. Maka dari itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap

PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA DINAS KOPERASI PERTAMBANGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DINAS KOPPERINDAG) KABUPATEN PESIR SELATAN.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari uraian di atas, penulis merumuskan masalah dalam pernyataan-pernyataan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kopperindag Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bagaimana kinerja Keuangan Dinas Kopperindag Kabupaten Pesisir Selatan setelah diterapkan anggaran berbasis kinerja.

1.3 BATASAN MASALAH

Tempat penelitian ini adalah Dinas Koperasi Perdagangan Perindustrian dan Pertambangan Energi Kabupaten Pesisir Selatan. Evaluasi penepan anggaran berbasis kinerja ini akan penulis analisa pada pencapaian sasaran dan program/ kegiatan tahun 2008.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengevaluasi bagaimana penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kopperindag Kabupaten Pesisir Selatan
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Keuangan Dinas Kopperindag Kabupaten Pesisir Selatan setelah diterapkannya anggaran berbasis kinerja (dengan menilai penggunaan/realisasi anggaran, apakah sudah sesuai dengan prinsip/konsep *value for money* (Efisien, Efektif dan Ekonomis).
3. Untuk mengetahui seberapa maksimal Dinas Kopperindag ini menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja, atau seberapa seriuskah Dinas ini menanggapi tuntutan reformasi dibidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB LIMA

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

- a. Keberhasilan dan kegagalan Dinas Kopperindag dalam mengemban amanah pembangunan sektor Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan Pertambangan Energi sangatlah tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi, situasi dan kondisi yang dimaksud terkait sekali dengan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2008 telah berjalan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, meskipun di dalamnya terdapat kekurangan-kekurangan.
- c. Dari beberapa kegiatan yang dilakukan ada yang berhasil sesuai target dan ada yang masih jauh dari target sasaran, seperti : survey potensi bahan galian biji besi, timah hitam dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan.
- d. Dalam penggunaan/pengalokasian anggaran, dinas kopperindag telah memakai prinsip 3E.

5.2 SARAN -SARAN

- a. Sebaiknya Dinas Kopperindag lebih serius lagi dalam melaksanakan anggaran berbasis kinerja, karena dalam peraturan pemerintah dan undang-undang telah dinyatakan dengan tegas bahwa setiap instansi pemerintah dituntut untuk melaksanakan anggaran berbasis kinerja guna memperbaiki kinerja baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3. (2005). *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja(Revisi)*. Jakarta
- Halim dan Damayanti ((2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YPKN
- Halim, Abdul. ((2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. BPFE
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. CV. Andi Offset
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Penerapan Anggaran Terpadu Berbasis Kinerja di Indonesia*. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang *Rencana Kerja Pemerintah*. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang *Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga*. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*. Jakarta
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta
- Jurnal/Artikel
- <http://www.google.org/> Santoso, Urip (2009) *Penganggaran Berbasis Kinerja*, March 11th, 2009 at 12:31 am
- Mubarak, Ali. *Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja*. Jakarta